

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

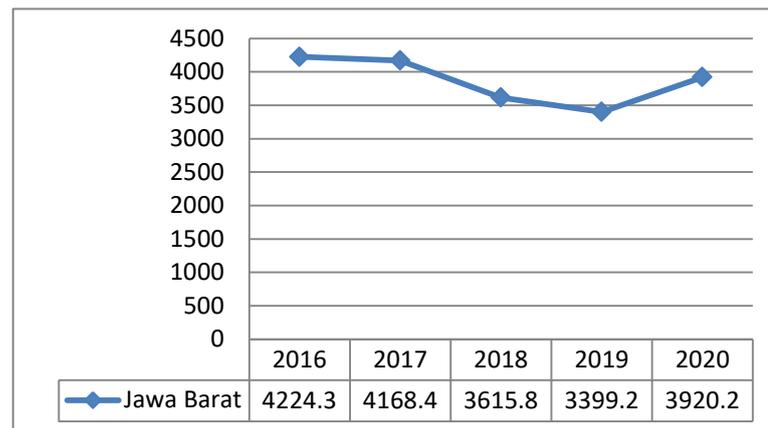
### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari daerah yang mempengaruhi pembangunan Indonesia, dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menjamin pembangunan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pembangunan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saepudin (2011) mengatakan bahwa pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Kemiskinan merupakan salah satu prioritas dari pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) telah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Dapat dilihat pada Gambar 1.1 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 berjumlah 4.224,3 jiwa dan selalu berfluktuasi setiap tahunnya.

Data tersebut merupakan akumulasi dari data penduduk miskin dari seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat**



*Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah*

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas utama agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena berperan penting dalam membuat kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk ekonomi, masyarakat, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu faktor yang tidak mendukung pendidikan adalah kemiskinan yang menghambat masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Kemiskinan dan

pendidikan merupakan dua aspek yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial (Herlina, 2017). Kemiskinan membuat orang memiliki akses terbatas ke pendidikan, dan pendidikan bertujuan untuk membantu orang keluar dari perangkap kemiskinan yang mereka jalani. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab tidak meratanya pendidikan, dan juga merupakan salah satu masalah dalam pendidikan Indonesia.

Selain itu, salah satu dari masalah utama kependudukan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan masyarakat terutama di negara berkembang seperti di Indonesia bersumber dari dua masalah utama, yaitu aspek fisik seperti fasilitas kesehatan dan pengobatan penyakit. Sedangkan aspek kedua adalah aspek non fisik yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang bersifat sederhana, murah, cepat, dan dengan prosedur yang sederhana. Masyarakat berharap pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan tidak memandang dari segi status sosial atau golongan tertentu.

Todaro dan Smith (2006:434) menyatakan bahwa modal manusia sangat dipengaruhi oleh permasalahan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan dan kesehatan merupakan indikator penting

dalam perkembangan manusia sekaligus penentu dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai jaminan bagi masyarakat kurang mampu. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.

Efek lain dari kehadiran Program JKN-KIS adalah adanya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2016 kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp. 152,2 triliun pada tahun 2016 dan bisa mencapai Rp. 289 triliun pada tahun 2021.

Disamping itu, kepedulian pemerintah terhadap pendidikan ditunjukkan melalui Program Indonesia Pintar. Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya anak usia sekolah dari 7 hingga 18 tahun. Salah satu indikatornya adalah terwujudnya hak-hak anak, termasuk hak atas

pendidikan. Selain itu, program ini akan mengurangi angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin. Namun pendidikan anak dilakukan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Saepudin (2013) mengatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat.

Selanjutnya ada Simpanan Keluarga Sejahtera yang merupakan bantuan keuangan kepada keluarga berpenghasilan rendah dari pemerintah, yang diberikan dalam bentuk simpanan sebagai bagian dari strategi inklusif keuangan nasional. Program ini merupakan penyempurnaan dari mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai masyarakat. Melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini tentunya juga sangat bermanfaat bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga sebagai modal awal operasional usaha kecil menengah. Manajemen yang tepat akan berdampak besar pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Maliangga et al (2019) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terhadap konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kartu Indonesia Pintar dan program Kartu Indonesia Sehat berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga miskin, sehingga dapat disimpulkan bahwa program KIP dan KIS memiliki percepatan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT, KARTU INDONESIA PINTAR DAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA BARAT”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Jawa Barat?

2. Untuk mengetahui pengaruh program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dan berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas baik dari sisi teori maupun praktiknya. Dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh wawasan khususnya mengenai program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.